

ABSTRAK

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman selama ini menerapkan sistem pendekatan incremental dan line item. Penerapan dari pendekatan tersebut mengakibatkan ditemukannya pengalokasian dana yang tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya *overfinancing* dan *underfinancing* dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penyusunan APBD berbasis kinerja menjadi sebuah keharusan di daerah, karena dengan menggunakan anggaran tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB).

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan belanja rata-rata dengan model regresi linier sederhana Analisis Standar Belanja (ASB), menghitung nilai minimum dan maksimum anggaran belanja, serta menghitung prosentase alokasi belanja pada masing-masing objek belanja.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan diperoleh kewajaran Analisis Standar Belanja (ASB) Bappeda Sleman adalah sebagai berikut:

Untuk kegiatan reguler skpd yang termasuk ke dalam asb eks belanja administrasi umum jumlah sebesar Rp330.948.000 dimana untuk perhitungan anggaran menurut ASB sebesar Rp116.92.000, termasuk dalam kategori *Overfinance* dengan nilai sebesar Rp214.005.000 atau mengalami kenaikan sebesar 1%.

Sedangkan untuk kegiatan reguler skpd yang termasuk ke dalam asb belanja langsung jumlah sebesar Rp1.266.612.460 dimana untuk perhitungan anggaran menurut ASB sebesar Rp974.195.420, termasuk dalam kategori *Overfinance* dengan nilai sebesar Rp295.417.060 atau mengalami kenaikan sebesar 23%. Sehingga Kewajaran Belanja di Bappeda Sleman masuk dalam kategori "*Overfinance*" sehingga melebihi batas maksimal kewajaran. Atau dapat dikatakan kondisi *overfinance* yaitu sebanyak 16 kegiatan dan selebihnya dalam kondisi *underfinance* sebesar 6 kegiatan.

Kata Kunci: Analisis Standar Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah